

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. 2 ed. Bandung: Alumni.
- Alston, Lee J., dan Bernardo Mueller. 1991. *Property Rights and The State*. Handbook of New Institutional Economics.
- Bahar, Ujang. 2008. "Permasalahan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38(1):122–47.
- Bahasa, Tim Pusat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Basri, Hasan. 2013. "Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal IUS* 1(1):77–93.
- Berlin, Yuanita, Irwan Noor, dan Siswidiyanto. 2015. "Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Administrasi Publik* 3(1).
- Faridy. 2017. "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara." *UNUJA*.
- Fauzin. 2011. "Keberpihakan Pengaturan Hak Atas Informasi Publik Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Pranata Hukum* 6(2):161–70.
- Fratmawati, Dwi. 2006. "PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEMARANG (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen)." Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2017. "PENERAPAN ASAS KESEPAKATAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *Yuridika* 32(3):393. doi: 10.20473/ydk.v32i3.4783.
- Hamidah, Upik. 2015. "Implikasi Hukum Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Keberlanjutan Pembangunan Dalam Buku Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan." Hlm. 313 dalam *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Lampung: Publishing Bandar Lampung.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. 12 ed. Jakarta: Djambatan.

- Hasan, Suriyati. 2018. "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)." *Meraja Journal* 1(3):55–65.
- Hayati, Tri. 2019. "HAK PENGUSAHAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(3):768. doi: 10.21143/jhp.vol49.no3.2199.
- Iskandar. 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Laike, Reli Jevon. 2018. "KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA." *Jurnal Hibualamo : Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 2(2):66–70.
- Limbong, Bernard. 2011. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Manoppo, Pieter George. 2019. "PELANGGARAN UU DAN ATURAN PEMBEBASAN TANAH RUAS TOL MANADO-BITUNG 2 DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK EKOSOBILING & MODAL SOSIAL PEMILIK TANAH." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2(1):208–26.
- Meuwissen, D. H. M. 2017. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir, Sirojul. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Parlindungan, A. P. 1994. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. 2 ed. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, Agung Basuki. 2018. "Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum." *Administrative Law & Governance Journal* 1(3):259–67.
- Prasetyo, Rindang Bangun, dan Dan Muhammad Firdaus. 2009. "PENGARUH INFRASTRUKTUR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 2(2):222–36.
- Rajagukguk, Erman. 2012. *Serba-serbi Hukum Agraria: Tanah Untuk Kepentingan Umum, Larangan Alih Fungsi Tanah Pertanian, Landreform*

- Tanah Pekarangan*. 1 ed. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rohaedi, Edi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro. 2019. "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *Pakuan Law Review* 5(1):198–220.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. 1 ed. Malang: Bayumedia.
- Sakti, Trie. 2007. "Permasalahan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Ilmiah BPN* 8(2).
- Sari, Ni Luh Ariningsih. 2021. "KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP TANAH DALAM HUKUM TANAH (UUPA) DAN KONSTITUSI." *Jurnal Ganec Swara* 15(1).
- Setianingsih, Budhi, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. "EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMRENDA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 3(11):1930–36.
- Sigarlaki, Belinda Maria, Roosie Lasut, dan Roy Ronny Lembong. 2023. "Analisis Terhadap Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengambilalihan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Lex Privatum* 11(2):1–9.
- Sitorus, Oloan, dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, Rahayu. 2016. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia* 5(2):376–94.
- Sufriyadi, Yanto. 2013. "Pengertian Kepentingan Umum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII* 20(1):123.
- Sumardjoko, Imam, dan Muhammad Heru Akhmadi. 2019. "PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIFITAS SEBAGAI DAYA UNGKIT EKONOMI DAN PEMANGKAS KEMISKINAN JAWA TIMUR." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1(1):22–31.

- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2020. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Vol. 1. 1 ed. disunting oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2018. *Pembebasan Tanah Dan Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. 4 ed. disunting oleh N. Oktaviani. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Tehupeiory, Aartje. 2018. *Putusan Pengadilan Pada Kasus Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. 1 ed. Jakarta: UKI Press.
- Utomo, Setiyo. 2020. "Problematika Proses Pengadaan Tanah." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5(2):20–36.
- UU No. 2 Tahun. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. 12. Indonesia.
- UU No. 5 Tahun. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- UUD Tahun. 1945. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Wulandari, Retno. 2012. "Dimensi-Dimensi Persepsi Risiko Keseluruhan Konsumen." *JRMB* 7(2).
- Zakie, Mukmin. 2011. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)." *Jurnal Hukum* 18:187–206.